

# ***Six Party Talks* dalam Negosiasi Amerika Serikat dan Korea Utara Terkait Daftar Hitam Negara-Negara Pendukung Terorisme Tahun 2003 – 2008**

**I.G.N. Dwi Putra Justisiawan**

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: igndwiputra@gmail.com

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to explain the role of six party talks in United States and North Korea negotiation process. There are many diplomacy issues between United States and North Korea, one of the hot issues that were on discussed was the issue of the inclusion of North Korea in the black list of the state sponsors of terrorism that maked by the United States. Various negotiations have been carried out by the two countries to achieve the mutual agreement, one of the negotiations which that was held between the two countries are the negotiations that involving the six party talks. In this case, I put more emphasis on the role of the six party talks in the negotiations between United States and North Korea to reach a mutual agreement between the two countries.*

**Keywords:** *negotiations, six party talks, mutual agreement*

## **1. Latar Belakang**

Kemunculan Korea Utara dalam daftar negara yang mendukung aktivitas terorisme yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat menjadi salah satu isu dalam diplomasi Amerika Serikat-Korea Utara. Dimana Korea Utara yang merasa negaranya tidak pantas berada dalam daftar tersebut mengajukan tuntutan pada pemerintah Amerika Serikat yang sebelumnya juga ingin bernegosiasi dengan pihak Korea Utara terkait

penghentian aktivitas pembangunan nuklir Korea Utara.

Dalam menanggapi tuntutan Korea Utara untuk menghilangkan nama negara mereka dari dalam daftar tersebut maka pada April 2003 administrasi pemerintahan George W. Bush menawarkan penghapusan Korea Utara dari daftar negara yang dianggap pemerintah Amerika Serikat sebagai negara pendukung terorisme apabila Korea Utara bersedia mengakhiri program nuklir mereka. Amerika

Serikat dan Korea Utara pun menegosiasikan hal tersebut melalui mekanisme *six party talks*. Negosiasi yang terjadi mengalami pasang surut sejak tahun tersebut hingga akhirnya pada tahun 2007 negosiasi ini mendapatkan momentumnya dan pada tahun 2008 proses penghapusan Korea Utara dari daftar negara pendukung aktivitas terorisme mulai dilakukan.

## **2. Proses Negosiasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara**

Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan konflik diantara mereka (Adair & Brett, 2004: 158). Adapun dalam prosesnya, suatu negosiasi membahas tentang tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dan mencari solusi untuk mengakhiri konflik diantara pihak-pihak yang terlibat. Begitupula dengan negosiasi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara, dimana krisis diplomasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara dimulai pada saat Korea Utara menyatakan keinginannya untuk keluar dari perjanjian *Non Proliferation Nuclear* yang telah diikuti sejak tahun 1985 dan menolak untuk memberikan ijin bagi IAEA untuk menyelidiki fasilitas nuklirnya di Yongbyeon pada bulan Januari 1994. Namun, krisis tersebut dapat teratasi menjelang akhir tahun 1994, dimana Korea Utara dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan dalam pertemuan yang dilakukan di

Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk menjawab “Bagaimana peran *six party talks* dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Korea Utara terkait pengeluaran Korea Utara dari daftar hitam negara-negara pendukung terorisme?”.

Jenewa pada bulan Oktober 1994 yang mana Korea Utara sepakat untuk membekukan program nuklirnya di Yongbyeon setelah menerima bantuan dari Amerika Serikat.

Peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan *World Trade Centre* di Amerika Serikat juga menjadi babak baru dalam hubungan diplomasi kedua negara, dimana Amerika Serikat yang sejak peristiwa tersebut memberikan seruan perang melawan terorisme juga mengeluarkan daftar negara-negara yang dianggap mendukung aktivitas terorisme. Dalam daftar yang baru dikeluarkan pada tahun 2003 tersebut Amerika Serikat juga memasukkan nama Korea Utara ke dalamnya karena Korea Utara dianggap dapat memberikan teror terhadap negara lain, dimana Amerika Serikat mencontohkan peristiwa penculikan warga Jepang oleh agen-agen Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an sebagai salah satu tindakan terorisme yang berkaitan dengan perlindungan manusia (Patterns of Global War Terrorism, 2003: para 92). Korea Utara pun tidak terima negaranya dimasukkan dalam daftar tersebut, apalagi

mereka telah mengakui bahwa telah melakukan tindakan penculikan tersebut dan juga telah membebaskan lima orang warga Jepang yang diculik itu pada tahun 2002. Namun, Jepang mengatakan bahwa masih banyak warga Jepang yang ditahan Korea Utara kepada Amerika Serikat sehingga hal tersebutlah yang membuat Korea Utara tetap dimasukkan dalam daftar tersebut.

Krisis diplomasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat pun sebenarnya sudah terjadi kembali pada saat Korea Utara mengakui bahwa mereka diam-diam tetap mengembangkan program nuklirnya di Yongbyeon pada tahun 2002. Hingga akhirnya kemunculan Korea Utara dalam daftar nama-nama negara yang mendukung aktivitas terorisme pada tahun 2003 tersebut juga semakin memperuncing hubungan kedua negara. Hal ini juga yang telah membuat Korea Utara kembali membuka program nuklirnya yang sebelumnya dibekukan, secara terang-terangan pada tahun 2003 dan juga mengeluarkan diri dari perjanjian *Non Proliferation Nuclear*.

Dalam menanggapi krisis ini, pemerintah Amerika Serikat berinisiatif untuk melakukan perundingan lagi dengan pihak Korea Utara, dimana pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush pada bulan April 2003 menawarkan penghapusan Korea Utara dari daftar negara-negara yang mendukung aktivitas terorisme yang dikeluarkan Amerika Serikat tersebut serta menormalisasi kembali hubungan antar kedua negara dan sebagai gantinya

Amerika Serikat meminta Korea Utara untuk meninggalkan program nuklir yang telah dilakukannya kembali di Yongbyeon.

Adapun proses negosiasi yang terjadi antara kedua negara ini melibatkan peran dari *six party talks* yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Rusia, dan Cina. Negosiasi ini diawali dengan pertemuan trilateral di Beijing pada bulan April 2003 antara Korea Utara, Amerika Serikat, dan Cina yang juga merupakan tahap pertama negosiasi yang melibatkan peran *six party talks*. Negosiasi ini terdiri dari lima tahap termasuk juga negosiasi antara Jepang dengan Korea Utara dan Amerika Serikat terkait penculikan yang dilakukan agen-agen Korea Utara terhadap warga Jepang yang masih belum menemui titik temu. Negosiasi-negosiasi yang berlangsung ini pada akhirnya memunculkan kesepakatan bersama pada bulan September 2005, dimana dalam kesepakatan tersebut Korea Utara menyatakan bersedia untuk meninggalkan program nuklirnya di Yongbyeon, kembali masuk dalam perjanjian *Non Proliferation Nuclear*, dan juga memberikan ijin bagi perwakilan IAEA untuk memonitor proses denuklirisasi tersebut dengan timbal balik berupa bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang serta penghapusan Korea Utara dari daftar negara-negara yang dianggap mendukung aktivitas terorisme (The New York Times, 2005).

Kesepakatan ini juga membuka jalan bagi Korea Utara untuk menormalisasi hubungannya dengan Amerika Serikat dan

juga Jepang. Namun, negosiasi penerapan isi dari kesepakatan tersebut menemui hambatan pada bulan November 2005 setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan terjadinya pencucian uang oleh pemerintah Korea Utara di Bank Banco Delta Asia yang berada di Macao yang membuat pemerintah Macao membekukan sekitar 50 rekening milik pemerintah Korea Utara yang ada di Bank Banco Delta Asia tersebut. Akibat dari adanya pembekuan rekening milik pemerintah Korea Utara tersebut negosiasi pun menjadi berantakan dan kembali memanas setelah pada tahun 2006 pemerintah Korea Utara melakukan tindakan provokasi dengan uji coba nuklirnya.

Dalam situasi yang semakin tegang ini, pemerintah Cina pada awal tahun 2007 menekan pemerintah Korea Utara untuk kembali dalam perundingan yang berlangsung terkait negosiasi penerapan hasil dari kesepakatan bersama pada bulan September 2005 tersebut hingga akhirnya perundingan dilakukan kembali pada bulan Februari 2007 dengan membahas penerapan isi dari kesepakatan bersama pada September 2005 tersebut dan juga melibatkan proses-proses perundingan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Pada bulan Juli 2007, negosiasi ini

menemukan momentumnya setelah Korea Utara menutup Yongbyeon dan mulai menonaktifkan delapan ribu batang bahan bakar reaktor nuklirnya dengan dibantu oleh para ahli dari Amerika Serikat (Councils on Foreign Relation, 2012). Lalu pada bulan Mei 2008, Korea Utara menyerahkan sekitar delapan belas ribu halaman dokumen perincian catatan produksi program nuklir mereka pada IAEA dan juga meledakkan menara pendingin pabrik nuklir mereka di Yongbyeon pada bulan Juni 2008. Tindakan Korea Utara ini juga ditanggapi dengan penghapusan sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat kepada Korea Utara pada bulan Juli 2008 dan juga penghapusan Korea Utara dalam daftar negara-negara pendukung aktifitas terorisme pada bulan Oktober 2008 sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari penjelasan singkat tentang negosiasi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara tersebut dapat dilihat bahwa proses negosiasi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara mengalami pasang surut dalam pembicaraannya. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai antara kedua negara juga tidak bisa dilepaskan oleh peran *six party talks* dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak ini.

### **3. Peranan *Six Party Talks* dalam Proses Negosiasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kesepakatan-kesepakatan antara kedua negara tidak bisa dilepaskan oleh peran *six party talks*. *Six Party Talks* sendiri adalah mekanisme perundingan multilateral dengan melibatkan Amerika Serikat dan Korea Utara sendiri serta melibatkan Jepang, Korea Selatan, Cina dan juga Rusia sebagai penengah dari tahapan negosiasi tersebut.

Peranan *six party talks* ini sendiri dapat dilihat dari peran masing-masing negara dalam mekanisme negosiasi multilateral ini serta kepentingannya untuk ikut dalam proses negosiasi ini, dimana Cina berperan sebagai ketua perundingan, karena kedekatan hubungan antara Korea Utara dengan Cina yang membuat peran Cina sangat besar dalam perundingan ini, yaitu untuk memprovokasi Korea Utara agar bersedia terus menjalani negosiasi yang berlangsung. Bahkan pada awal tahun 2007, Cina menekan pemerintah Korea Utara untuk mengikuti proses negosiasi kembali yang menemui hambatan pada tahun 2006.

Sedangkan peran Rusia dalam *six party talks* ini adalah sebagai pihak yang dipercaya oleh Korea Utara selain China untuk menjadi penengah dalam negosiasi yang terjadi antara Korea Utara dan Amerika Serikat.

Selain Rusia dan Cina, dua anggota lainnya yaitu Korea Selatan dan Jepang juga memiliki perannya masing-masing dalam proses negosiasi ini, dimana peranan Korea Selatan dalam *six party talks* ini adalah sebagai pihak yang menawarkan bantuan pembangkit listrik sebesar 2 gigawatt pada tahun 2005 kepada Korea Utara, agar Korea Utara bersedia menjalani proses negosiasi ini sampai akhir (Hayes et.al, 2005: 1).

Sedangkan peranan Jepang dalam *six party talks* ini adalah sebagai pihak yang menawarkan bantuan ekonomi serta normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea Utara apabila Korea Utara bersedia menghentikan program nuklirnya. Adapun normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea Utara sebelumnya juga pernah dinegosiasikan antara kedua negara ini pada Januari 1991 - November 1992 (Fouse, 2004: para 4).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa masing-masing negara dalam *six party talks* ini memiliki peranannya masing-masing untuk turut berkontribusi dalam proses negosiasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat tersebut. Adapun kepentingan Korea Utara dan Amerika Serikat dalam negosiasi tersebut akan dibahas dalam bahasan selanjutnya.

#### **4. Kepentingan Amerika Serikat dan Korea Utara dalam Proses Negosiasi Terkait Penghapusan Korea Utara dari Daftar Hitam Negara-Negara Pendukung Aktivitas Terorisme**

Menurut *Alan Gyngell & Michael Wesley* (2007), kepentingan nasional adalah suatu konsep permanen yang menjadi orientasi kebijakan luar negeri suatu negara. Konsep kepentingan nasional ini juga selalu menjadi landasan bagi semua pengambilan keputusan luar negeri dan juga dalam menganalisa kebijakan luar negeri. Kepentingan suatu negara bangsa ini juga diperlihatkan dengan tingkah lakunya dalam membela, mengejar dan mempertahankan apa yang menjadi kepentingan dasarnya. Bagi banyak negara, kepentingan dasar suatu negara adalah menjaga wilayah, rakyat dan kedaulatannya. Semua unsur ini harus dipertahankan dan diperjuangkan agar tetap eksis dalam suatu negara. Mempertahankan kepentingan ini menjadi dasar dari tingkah laku suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dan aktor-aktor lain dalam sistem internasional, termasuk diantaranya melalui perang dan diplomasi (Dorff, 2004: 5).

Dari penjelasan tentang konsep kepentingan nasional ini maka untuk menganalisa kepentingan Amerika Serikat dan Korea Utara dalam negosiasi diantara kedua negara tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dasar kedua negara. Dimana kepentingan dasar dari

Amerika Serikat dalam hal ini adalah untuk mencegah penggunaan atau memperlambat penyebaran senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, mengamankan senjata nuklir dan bahan-bahannya, serta mencegah proliferasi sistem pengiriman menengah dan jangka panjang untuk senjata nuklir di suatu kawasan.

Hal inilah yang menjadi dasar keinginan Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan Korea Utara dengan alasan untuk menghapuskan Korea Utara dari daftar hitam negara-negara pendukung terorisme, Amerika Serikat dapat menegosiasikan kepentingannya yaitu penghentian program nuklir Korea Utara yang dianggap dapat mengganggu kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik di dalam persyaratan yang diajukan ke pemerintah Korea Utara. Selain itu, Amerika Serikat juga menjanjikan normalisasi hubungan diantara kedua negara, dimana hal ini juga bisa digunakan Amerika Serikat untuk mempromosikan kepentingan-kepentingannya yang lain seperti menyebarkan demokrasi dan perdagangan bebas ke Korea Utara.

Kepentingan Korea Utara sendiri dalam negosiasi ini adalah untuk menjaga keamanan rejim Korea Utara. Dimana keamanan rejim Korea Utara ini bisa dicapai dengan sempurna melalui perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat. Apalagi Korea Utara juga telah dimasukkan kedalam daftar hitam negara-negara yang dianggap mendukung aktivitas terorisme, sehingga Korea Utara dapat dijatuhi sanksi ekonomi oleh PBB. Oleh

karena itu, menurut pandangan Korea Utara, penghapusan Korea Utara dari daftar hitam negara-negara pendukung aktivitas terorisme tersebut sangat penting untuk menjaga keamanan rejim yang berkuasa di Korea Utara. Selain itu dalam proses negosiasi itu, Korea Utara juga

## 5. Kesimpulan

Dari bahasan-bahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa peran negara-negara dalam *six party talks* sangat besar dalam proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Adapun dalam proses negosiasi ini, tuntutan Korea Utara dan

## 6. Referensi

Wendi Lyn Adair & Jeanne M. Brett. 2004. Culture and Negotiation Processes. Dalam Michele J. Gelfand and Jeanne M. Brett (Ed). *The Handbook of Negotiation and Culture* (hal. 158-176). California : Stanford University Press.

U.S Secretary Of State. 2004. *Pattern of Global War On Terrorism 2003*. Washington: U.S Department Of State.

Allan Gyngell & Michael Wesley. 2007. *Making Australia Foreign Policy (Second Edition)*. New York: Cambridge University Press.

Hayes, Peter., Hippel, David von., Kang, Jungmin., Suzuki, Tatsujiro., Tanter, Richard., Bruce, Scoot. 2005.

mempercai bahwa selain menjaga keamanan rejimnya, mereka juga akan bisa mendapat keuntungan ekonomi, seperti program bantuan yang bervariasi dari negara-negara yang tergabung dalam *six party talks* tersebut.

Amerika Serikat tetaplah menjadi bahasan utama dalam negosiasi tersebut yaitu penghapusan Korea Utara dari daftar hitam negara-negara pendukung terorisme yang dikeluarkan Amerika Serikat serta penghentian program nuklir yang dibangun oleh Korea Utara.

*South Korea's Power Play at the Six-Party Talks*, diunduh tanggal 20 April 2012 dari [http://nautilus.org/attachments/050\\_ROK\\_Energy\\_Aid.pdf](http://nautilus.org/attachments/050_ROK_Energy_Aid.pdf)

David Fouse. 2004. *Japan's Post-Cold War North Korea Policy: Hedging toward Autonomy?*, diunduh tanggal 20 April 2012 dari <http://www.apcss.org/Publications/Ocasional%2520Papers/OPJapansPostColdWarNorthKoreaPolicy.pdf>

Robert "Robin" H.Dorff. 2004. Some Basic Concept and Approaches to the Study of International Relations. Dalam J.Boone Bartholomess, Jr (Ed). *US Army War College: Guide To National Security Policy And Strategy* (hal. 3-11). Diunduh tanggal 21 April 2012 dari <http://www.strategicstudiesinstitute>.

[army.mil/pubs/download.cfm?q=40](http://www.army.mil/pubs/download.cfm?q=40)

9

Council on Foreign Relations. 2012. *The Six-Party Talks on North Korea's Nuclear Program-2012-02-29* diakses pada tanggal 10 April 2012 dari <http://www.cfr.org/proliferation/sixpartytalks-north-koreas-nuclearprogram/p13593>

The New York Times. 2005. *North Korea Says It Will Abandon Nuclear Efforts* 2005-09-19 diakses pada tanggal 10 April 2012 dari [http://www.nytimes.com/2005/09/19/international/asia/19korea.html?\\_r](http://www.nytimes.com/2005/09/19/international/asia/19korea.html?_r)

≡1